

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin, Imron, 2004, *Pengawasan Pendidikan*, Universitas Negeri Malang, Malang
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bedworth, D.D dan Bailey, J.E. 1982. *Integrated Production Control System Management, Analysis, Design*. John Wiley and Son Inc., New York
- Budiman, Rusli, 2013, *Kebijakan publik membangun Pelayanan Publik Responsif*, Hakim Publising, Bandung
- Fauzan, Muhammad, 2010, *Hukum pemerintahan daerah: kajian tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*, STAIN Press, Purwokerto
- Gede Atmaja, I Dewa, 1994, *Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan*, Program Pascasarjana UNAIR, Surabaya
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta
- HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hakim, Lukman, 2012 *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Huda, Ni'matul, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung
- J, Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2009, *Pengantar Teori Hukum*, diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, Nusa Media, Bandung
- Kumorotomo, Wahyudi, 1999, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kweit dan Robert W. Kweit, Mary, 1986, *Konsep dan Metode Analisis Politik*, diterjemahkan oleh Ratnawati, Bina Aksara, Jakarta,

- Latif, Abdul, 2016, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta
- Lubis, Ibrahim, 1995, *Pengawasan dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Marbun, SF, 2011, *Menggali dan Menemukan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- M. Hadjon, Philipus, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Erlangga, Surabaya
- M. Hardjon, Philipus, 2010, *Hukum Administrasi dan Good governance*, Trisakti, Jakarta
- M. Hardjon, Philipus, 2011 *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Nugraha, Et. Al, Safri, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
- N. B. Silalahi, Bennett, 1995, *Manajemen Integratif (bacaan untuk manajer utama)*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI, Jakarta
- Panglima Saragih, Juli, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- P Sibuea, Hotman, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Airlangga, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- S Attamimi, A Hamid, 1993, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Siagian, Sondang, 2008, *Manajemen Stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Situmorang dan Yusuf Juhir, Victor M, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soehino, 2011, *Tertib Hukum di Indonesia*, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta
- Soerjono, Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Yogyakarta

- Sudrajat, Tedi, 2019, *Diktat Metode Penelitian Hukum (Doktrinal)*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto
- Suko Legowo, Pramono, 2006, *Materi Kuliah Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto
- Sri Djatmiati, Tatiek, 2004, *Disertasi Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, FH UNAIR, Surabaya
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syarifudin, Ateng, 1996, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Talizuduhu Ndraha, Talizuduhu, 2003, *Kybernologi (ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 2, Rineka Cipta, Jakarta
- Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta
- Widodo, Joko, 2007, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi: Analisis Proses Kebijakan Publik*, Banyumedia, Malang
- Winarno, 2007, *Budi Kebijakan Publik : Teori dan Praktek*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Yahya dan Endah Fitri Susanti, Marzuki, 2012, *Buku Pintar Pengadaan barang atau Jasa Pemerintah*. Laskar Aksara, Jakarta.

Jurnal :

- Ade Nurul Aida dan Ervita Luluk Zahara, *Dana Kelurahan dan Tantangannya*, Buletin APBN, Vol. III, Edisi 21, November 2018, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI
- Apri Listiyanto, *Pembaharuan Regulasi Pengadaan barang atau Jasa Pemerintah (Reformation Regulation of Goods and Services Government Procurement)*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Volume 1 Nomor 1, April 2012
- Darmansyah, *Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran Atas Kerugian Keuangan Negara*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015

Haris, K, Jurnal *tentang Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah*, Jurnal Yuridika, Vol 30, No 1 Januari 2015

Jorawati Simarmata, *Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (The Perspective Of Local Policy In Contex Of Law Number 23 Of 2014 On Local Government And Other Related Laws)*, e-jurnal.peraturan.go.id, 2018

Mustamu, Julia *'Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintah'*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011

Sufriadi, *'Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia'*, 1 Jurnal Yuridis, 2014,

Sukarno Aburaera sebagaimana dikutip Marilang, *"Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif"*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017

Tatiek Sri Djatmiati, 2004, *'Faute Personelle dan Faute De Service dalam Tanggung Gugat Negara*, Jurnal Jurist Diction, Vol 2, No 3 2019

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2011 tentang Pengadaan barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Banyumas

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018

Internet :

Budi Sulis, Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pengelolaan Dana Kelurahan, <https://www.kompasiana.com/>, di akses tgl 27 Oktober 2019 Pukul 21.05

Mustofa Kamal, Mencermati Arah Perubahan Aturan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/artikel/namafile/52/Mencermati_Arah_Perubahan_Aturan_PBJP.pdf

Nidaur Rahmah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tahapannya, https://www.pengadaan_barang.co.id/2019/12/pengelolaan-keuangan-daerah.html, di akses tanggal 3 Juli 2020 Pukul 20.30 Wib

Samsul Ramli, Agar Pengadaan di Kelurahan Tidak Meresahkan, <https://samsulramli.net/2019/08/29/agar-pengadaan-di-kelurahan-tidak-meresahkan/>, di akses 28 Juli 2020 Pukul 13.54 Wib.

Sri Astuti, Kewenangan Pengelolaan Keuangan Negara, <https://keuanganism.com/kewenangan-pengelolaan-keuangan-negara/>, di akses tanggal 22 Juli Pukul 21.00 Wib.

<https://www.slideshare.net/mhyoali/public-policy-dan-administrasi-negara>. diakses pada tanggal 28 Juli 2020 ,pukul 14.25 wib.

Wawancara :

Wawancara dengan Nugroho staf Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Sulbani Yusuf Kepala Sub Bidang Dana Transfer Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Farid Widodo Kurniawan Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas